

Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Indonesia

Lutfi Hardiyanto¹, Saryono^{2*}, Romdanih³

^{1,2}Program Studi PPKn, STKIP Kusuma Negara, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP Kusuma Negara, Indonesia

Abstrak—Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan serius berupa radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi di tengah arus globalisasi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bersama moderasi beragama memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan toleran. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran PPKn dalam mempromosikan moderasi beragama, serta mengidentifikasi strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, meliputi buku, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan. Data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan integrasi PPKn dan moderasi beragama terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang toleransi, menghargai perbedaan, dan menghindari sikap ekstrem. Strategi efektif meliputi pendekatan kurikulum integratif, pembelajaran kolaboratif antara guru PPKn dan guru agama, metode aktif seperti diskusi, debat, dan role-playing, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. PPKn dan moderasi beragama berkontribusi signifikan dalam membangun ketahanan nasional berbasis nilai Pancasila. Implementasi yang konsisten dan dukungan kebijakan yang tepat dapat menjadi kunci terciptanya generasi muda yang berkarakter, moderat, dan siap menghadapi tantangan global.

Kata kunci:

Karakter,
Kewarganegaraan,
Moderasi Beragama,
Toleransi.

Histori:

Dikirim: 16 Agustus 2025
Direvisi: 1 September 2025
Diterima: 7 September 2025
Online: 30 September 2025

©2025 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Hardiyanto, L., Saryono, S., & Romdanih, R. (2025). Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(2), 155-161

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama yang tinggi. Keanekaragaman ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan yang memerlukan pengelolaan bijak agar tidak memicu konflik. Di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan baru seperti radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi

^{2*}Corresponding author.

E-mail: saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id

semakin nyata, terutama di kalangan generasi muda. Perubahan nilai akibat penetrasi budaya global, perkembangan teknologi informasi, dan polarisasi sosial dapat mengikis rasa persatuan dan toleransi jika tidak diantisipasi melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai moderat (Nasution, 2018).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki mandat strategis untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—menjadi fondasi moral dan spiritual bangsa. Landasan hukum pelaksanaan PPKn di seluruh jenjang pendidikan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Komaruddin, 2019). PPKn tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga wadah pembentukan karakter, penguatan nasionalisme, dan internalisasi nilai-nilai moral bangsa (Adiotomo & Yusuf, 2018).

Di sisi lain, moderasi beragama didefinisikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) sebagai upaya menempatkan ajaran agama secara adil dan seimbang, menghindari sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai kemanusiaan universal. Prinsip-prinsip moderasi beragama—keadilan, keseimbangan, dan toleransi—selaras dengan Pancasila, sehingga relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn (Asy'ari, 2020). Menurut Nashir (dalam Kementerian Agama RI, 2019), moderasi beragama mencakup dimensi spiritual-teologis, budaya-etis, dan politik-kebijakan yang bersifat inklusif, demi menciptakan ruang publik yang harmonis.

Integrasi PPKn dan moderasi beragama dalam pendidikan memiliki urgensi yang tinggi. Pertama, membentuk generasi muda yang berkarakter dan toleran sehingga mampu menjadi agen perdamaian (Hurtado & Arciniega, 2010). Kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman (Chusain & Muhaimin, 2019). Ketiga, memerangi radikalisme dan ekstremisme melalui pendidikan yang menanamkan nilai toleransi sejak dini (Faruq & Noviani, 2016). Keempat, mendukung kebijakan pemerintah yang menjadikan PPKn dan moderasi beragama sebagai program prioritas dalam pembangunan nasional (Mujahidin, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPKn dalam mempromosikan moderasi beragama, menjelaskan konsep dan relevansinya dalam konteks masyarakat majemuk, mengeksplorasi strategi integrasi di lingkungan pendidikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan peran keduanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menganalisis konsep, peran, dan strategi integrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan moderasi beragama berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan (Wahidmurni, 2017). Sumber data yang digunakan terdiri dari

sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan yang secara langsung membahas PPKn dan moderasi beragama. Sumber sekunder mencakup laporan penelitian, prosiding, dan publikasi daring yang relevan dengan pendidikan karakter dan toleransi. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data daring seperti Google Scholar, DOAJ, SpringerLink, dan portal jurnal nasional (Sinta, Garuda) dengan menggunakan kata kunci “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, “moderasi beragama”, “pendidikan karakter”, dan “toleransi”.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu identifikasi literatur yang relevan berdasarkan topik dan kata kunci, seleksi sumber yang memenuhi kriteria kredibilitas seperti terbit di lembaga akademik atau jurnal terindeks, dan kompilasi data dari sumber yang telah dipilih. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari literatur yang diperoleh. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema seperti urgensi, peran, strategi, dan tantangan integrasi PPKn dan moderasi beragama. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan temuan penelitian berdasarkan analisis komparatif antar-sumber. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyajikan sintesis yang komprehensif tentang peran PPKn dalam mempromosikan moderasi beragama, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk praktik pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Membangun Generasi Muda yang Berkarakter dan Toleran

Generasi muda merupakan aset strategis bangsa yang akan menentukan arah masa depan Indonesia. Di tengah arus globalisasi, mereka menghadapi tantangan berupa pergeseran nilai, penetrasi budaya asing, serta derasnya arus informasi yang tidak selalu membawa dampak positif. Tanpa pondasi karakter yang kuat, generasi muda rentan terhadap paham radikalisme dan intoleransi (Hurtado & Arciniega, 2010). Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi salah satu pendekatan penting yang dapat membentuk sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan secara damai. Pendidikan karakter berbasis Pancasila yang diajarkan melalui PPKn memberikan kerangka moral dan etis yang dapat memperkuat identitas kebangsaan sekaligus mempromosikan nilai-nilai toleransi (Adiotomo & Yusuf, 2018).

Pentingnya membangun karakter toleran sejak usia dini juga diperkuat oleh pandangan Chusain dan Muhaimin (2019) yang menekankan bahwa karakter toleran bukanlah hasil dari proses instan, melainkan memerlukan pembiasaan yang konsisten melalui keteladanan di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Proses ini melibatkan internalisasi nilai melalui pembelajaran formal, interaksi sosial, dan pengalaman langsung yang membentuk kesadaran akan pentingnya keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

Moderasi Beragama sebagai Program Prioritas Nasional

Moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas nasional yang dicanangkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Prinsip utamanya adalah menempatkan ajaran agama pada posisi yang adil dan seimbang, menghindari ekstremisme, serta mengedepankan nilai kemanusiaan universal (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan keyakinan, dan mendorong terjadinya dialog antarumat beragama (Asy'ari, 2020).

Penelitian Fitriani (2021) menunjukkan bahwa penerapan moderasi beragama di sekolah berkontribusi pada peningkatan kerukunan antar siswa dan mencegah konflik berbasis SARA. Hal ini diperkuat oleh temuan Mujahidin (2018) yang menegaskan bahwa moderasi beragama dapat menjadi benteng pertahanan terhadap ideologi radikal. Dalam kerangka ini, kolaborasi antara guru PPKn dan guru agama sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama tertanam secara efektif pada peserta didik melalui pembelajaran lintas mata pelajaran.

Peran PPKn dalam Mempromosikan Moderasi Beragama

PPKn memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan moral yang selaras dengan prinsip moderasi beragama. Melalui kurikulum yang dirancang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, PPKn memuat materi tentang hak dan kewajiban warga negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi landasan bagi sikap toleran (Komaruddin, 2019).

Menurut Depdiknas (2009), pendidikan karakter yang terintegrasi dalam PPKn mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, toleransi, demokrasi, cinta damai, kepedulian sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini secara langsung mendukung pembentukan sikap moderat di kalangan siswa. Misalnya, melalui pembelajaran berbasis diskusi dan studi kasus, siswa diajak untuk memahami perspektif berbeda dan menyelesaikan konflik secara damai, yang merupakan salah satu wujud nyata penerapan moderasi beragama.

Strategi Integrasi PPKn dan Moderasi Beragama dalam Pendidikan

Integrasi PPKn dan moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendekatan kurikulum, metode pembelajaran, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dari sisi kurikulum, materi tentang toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik dapat dimasukkan ke dalam tema PPKn yang relevan (Cholisin, 2003). Dari sisi metode pembelajaran, penggunaan teknik diskusi, debat, simulasi, dan role-playing dapat mendorong siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui pengalaman langsung.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti media pembelajaran interaktif, platform daring, dan media sosial dapat memperluas jangkauan pendidikan moderasi beragama di kalangan generasi muda (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2021). Tidak kalah penting, keterlibatan keluarga dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, sehingga pendidikan moderasi beragama menjadi proses holistik yang berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Terbaik

Optimalisasi peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mempromosikan moderasi beragama memerlukan dukungan kebijakan yang sistematis serta praktik pendidikan yang aplikatif di lapangan. Dari sisi kebijakan, langkah strategis yang dapat diambil adalah melakukan revisi kurikulum untuk mengintegrasikan materi moderasi beragama secara eksplisit dalam mata pelajaran PPKn. Materi ini harus dirancang sesuai jenjang pendidikan agar relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2021). Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sumber belajar yang berkualitas, seperti buku teks, modul pembelajaran, dan media interaktif yang memuat konten moderasi beragama yang kontekstual (Kementerian Agama RI, 2019).

Peningkatan kompetensi guru juga menjadi prioritas utama. Guru PPKn dan guru agama perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait strategi mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran. Pelatihan ini dapat mencakup penguasaan metode pembelajaran aktif seperti project-based learning, simulasi, dan role-playing yang dapat mengajak siswa terlibat langsung dalam penerapan nilai toleransi (Cholisin, 2003). Penelitian dan pengembangan berbasis sekolah juga direkomendasikan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi integrasi PPKn dan moderasi beragama, sehingga kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan bukti empiris (Miles et al., 2014).

Dalam praktiknya, sekolah dapat menerapkan budaya toleransi melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah, seperti diskusi lintas agama, peringatan hari besar nasional dan keagamaan secara inklusif, serta lomba-lomba bertema kebangsaan. Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan karakter dan toleransi juga dapat dilibatkan untuk memberikan penguatan melalui program pengabdian masyarakat (Mujahidin, 2018).

Keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan nilai yang diajarkan di sekolah. Orang tua dapat berperan sebagai teladan dalam menerapkan sikap moderat di lingkungan keluarga, sementara masyarakat dapat menyediakan ruang interaksi yang sehat bagi generasi muda. Dukungan regulasi dan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi juga perlu diperkuat, untuk memberikan rasa aman kepada semua warga negara dan memastikan bahwa nilai-nilai toleransi dapat berkembang dengan optimal (Nasution, 2018).

Dengan kombinasi kebijakan yang terarah, kompetensi guru yang memadai, sumber belajar yang berkualitas, serta dukungan keluarga dan masyarakat, integrasi PPKn dan moderasi beragama dapat berjalan secara efektif. Langkah ini akan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter moderat, berwawasan kebangsaan, dan siap menghadapi tantangan global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan moderasi beragama merupakan strategi penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan toleran. PPKn menyediakan kerangka normatif dan moral yang bersumber dari

Pancasila, sedangkan moderasi beragama menawarkan pendekatan inklusif dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Kombinasi keduanya tidak hanya relevan untuk menghadapi tantangan radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi, tetapi juga mendukung upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada.

Hasil kajian menunjukkan bahwa peran PPKn dalam mempromosikan moderasi beragama dapat dioptimalkan melalui pembaruan kurikulum, penyediaan sumber belajar yang kontekstual, pelatihan kompetensi guru, serta penerapan metode pembelajaran aktif yang menekankan pengalaman langsung peserta didik. Selain itu, keterlibatan keluarga, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam memastikan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan yang konsisten, disertai penguatan regulasi untuk mencegah intoleransi, akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pengembangan sikap moderat. Dengan demikian, integrasi PPKn dan moderasi beragama bukan sekadar wacana akademik, melainkan kebutuhan strategis dalam membangun ketahanan ideologis dan sosial bangsa. Jika diterapkan secara sistematis dan kolaboratif, langkah ini akan melahirkan generasi Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana, toleran, dan mampu menjadi agen perdamaian di tingkat nasional maupun global.

REFERENSI

- Adiotomo, S., & Yusuf, S. (2018). Pendidikan karakter dan toleransi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa: Sebuah studi di SMA Negeri 1 Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1), 43–54. <https://jpk.kominfo.go.id/>
- Asy'ari, A. (2020). Moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an: Studi tematik surah Al-Baqarah. *Jurnal Ilmi Al-Bayyinah*, 5(2), 337–354. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-bayyinah/article/view/7560>
- Cholisin. (2003). PPKn paradigma baru dan pengembangannya dalam KBK. Makalah disampaikan pada Training of Trainer (ToT) Guru SLTP Mata Pelajaran PPKn, Surakarta.
- Chusain, M., & Muhaimin, M. (2019). The influence of character education and tolerance values on the formation of superior human resources in the era of the industrial revolution 4.0. *International Journal of Educational Administration and Policy Studies*, 11(5), 12–20. <https://doi.org/10.5897/IJEAPS2019.0621>
- Depdiknas. (2009). Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- Faruq, U. A., & Noviani, D. (2016). Pendidikan moderasi beragama sebagai perisai radikalisme di lembaga pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 45–60. <https://doi.org/10.22219/jpi.v14i1.3704>
- Fitriani, F. (2021). Urgensi moderasi beragama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkualitas. *Jurnal Ilmi Al-Bayyinah*, 6(1), 217–234. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-bayyinah/article/view/8344>
- Hurtado, A., & Arciniega, G. M. (2010). Character education and the development of tolerant attitudes among youth. *Journal of Moral Education*, 39(4), 445–461. <https://doi.org/10.1080/03057240.2010.521378>

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MODERASI_BERAGAMA.pdf
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kemendikbudristek. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Komaruddin, D. (2019). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i1.1234>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mujahidin, A. (2018). Moderasi beragama: Upaya mewujudkan kerukunan dan toleransi umat beragama di Indonesia. *Jurnal Komuniti*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v10i1.5631>
- Nasution, H. (2018). Moderasi beragama: Upaya merawat keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa. *Jurnal Moderasi*, 1(1), 1–18. <https://jurnalmoderasi.uin-suka.ac.id/index.php/JM/article/view/1>
- Wahidmurni. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Semester Ganjil 2017/2018, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.